

LAPORAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2024
(AUDITED)



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2025



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau (Audited) yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan Informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catata Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nanga Bulik, Juli 2025
Penguasa Anggaran,

ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19670630 198702 2 001




KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 (Audited).

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 (Audited) merupakan pertanggungjawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024.

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 (Audited) memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 (Audited) ini masih belum sempurna untuk saran dan masukan dari pihak yang terkait kami harapkan demi kesempurnaan Laporan Keuangan dimasa yang akan datang.

Nanga Bulik, Juli 2025
Pengguna Anggaran,

ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19670630 198702 2 001



DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	vi
NERACA	vii
LAPORAN OPERASIONAL.....	ix
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xi
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	2
BAB II INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	3
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KAUANGAN	4
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	4
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	4
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	5
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	5
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	5
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	6
4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan	6
4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban	6
4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	7
4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset	8
4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban	8
4.3.6 Kebijakan Akuntansi Ekuitas	9
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	10
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
5.1.1 Pendapatan	10
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	11
5.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	11



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

5.1.1.3 Lain-lain PAD yang sah	12
5.1.2 Belanja	13
5.1.2.1 Belanja Operasi	13
5.1.2.2 Belanja Modal	17
5.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	18
5.1.3.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	18
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca	19
5.2.1 Aset	19
5.2.2 Kewajiban	27
5.2.3 Ekuitas	28
5.2.4 Kewajiban dan Ekuitas	28
5.3 Kegiatan Operasional	29
5.3.1 Pendapatan-LO	29
5.3.2 Beban-LO	31
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas	39
BAB VI PENUTUP	40



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1 SPM TPP PNS Bulan Desember 2024
- Lampiran 1.2 SPM Pajak TPP PNS Bulan Desember 2024
- Lampiran 1.3 SPM TPP PNS Bulan Desember 2023
- Lampiran 2 Utang Beban Tahun 2024
- Lampiran 3 Tabel Perhitungan Beban/Belanja Dibayar Dimuka atas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 4 Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan s/d Desember 2024
- Lampiran 5 Daftar Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 6.1 Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Anaudited Disnakertrans Tahun Anggaran 2024 Audited
- Lampiran 6.2 Daftar Mutasi Aset Periode s/d Desember 2024
- Lampiran 6.3 Rekapitulasi Barang ke Neraca Periode 31 Desember 2024
- Lampiran 6.4 Laporan Rekapitulasi Penyusutan
- Lampiran 6.5 Daftar Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2024
- Lampiran 7 Laporan Persediaan 31 Januari s/d 31 Desember 2024
- Lampiran 8.1 Kartu Inventaris Barang (KIB) A
- Lampiran 8.2 Kartu Inventaris Barang (KIB) B
- Lampiran 8.3 Kartu Inventaris Barang (KIB) C
- Lampiran 8.4 Kartu Inventaris Barang (KIB) D



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
Bidang Pemerintahan : 2.01		Tenaga Kerja			
Unit Organisasi : 2.01.01		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
Sub Unit Organisasi : 2.01.01.01		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	574.171.500,00	43.058.820,00	7,50	2.625.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	574.171.500,00	43.058.820,00	7,50	2.625.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	574.167.000,00	43.045.320,00	7,50	2.625.000,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	4.500,00	13.500,00	300,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	6.404.482.109,00	6.032.876.872,00	94,20	4.601.739.636,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.389.196.709,00	5.044.426.872,00	93,60	4.576.989.636,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.999.411.686,00	2.931.030.594,00	97,72	2.825.608.909,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.389.785.023,00	2.113.396.278,00	88,43	1.751.380.727,00
5.2	BELANJA MODAL	1.015.285.400,00	988.450.000,00	97,36	24.750.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.015.285.400,00	988.450.000,00	97,36	24.750.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(5.830.310.609,00)	(5.989.818.052,00)	102,74	(4.599.114.636,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (STILPA)		(5.830.310.609,00)	(5.989.818.052,00)	102,74	(4.599.114.636,00)



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 2 . 01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2 . 01 . 01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi	: 2 . 01 . 01 . 01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

URAIAN	2024	2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	2.675.599,00	3.001.524,00
Persediaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	2.675.599,00	3.001.524,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	1.402.269.000,00	1.402.269.000,00
Peralatan dan Mesin	4.560.873.334,90	3.569.043.334,90
Gedung dan Bangunan	3.853.715.136,00	3.853.715.136,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	906.890.364,00	906.890.364,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(6.848.351.398,90)	(6.378.072.007,90)
JUMLAH ASET TETAP	3.875.396.436,00	3.353.845.827,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	205.500.000,00	205.500.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(205.500.000,00)	(205.500.000,00)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00
Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00

<div>Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja</div> <div>Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</div> <div>Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</div>		
URAIAN	2024	2023
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
JUMLAH ASET	3.878.072.035,00	3.356.847.351,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	92.240.316,00	91.392.069,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	92.240.316,00	91.392.069,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	92.240.316,00	91.392.069,00
EKUITAS		
EKUITAS	3.785.831.719,00	3.265.455.282,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.878.072.035,00	3.356.847.351,00




PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
Bidang Pemerintahan : 2 . 01		Tenaga Kerja			
Unit Organisasi : 2 . 01 . 01		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN - LO	43.058.820,00	2.625.000,00	40.433.820,00	1.540,34
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	43.058.820,00	2.625.000,00	40.433.820,00	1.540,34
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	43.045.320,00	2.625.000,00	40.420.320,00	1.539,82
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	5.512.500.435,00	5.024.700.663,00	487.799.772,00	9,71
8.1.1	Beban Pegawai	2.931.878.841,00	2.817.689.400,00	114.189.441,00	4,05
8.1.2.1	Beban Persediaan	407.900.637,00	198.037.750,00	209.862.887,00	105,97
8.1.2.2	Beban Jasa	820.247.172,00	795.681.019,00	24.566.153,00	3,09
8.1.2.3	Beban Pemeliharaan	220.183.710,00	149.673.900,00	70.509.810,00	47,11
8.1.2.4	Beban Perjalanan Dinas	662.010.684,00	607.876.535,00	54.134.149,00	8,91
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	261.445.129,00	222.247.056,00	39.198.073,00	17,64
LAPORAN OPERASIONAL					Halaman 1 dari 2

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	162.040.287,00	162.040.287,00	0,00	0,00
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	46.793.975,00	71.454.716,00	(24.660.741,00)	(34,51)
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(5.469.441.615,00)	(5.022.075.663,00)	(447.365.952,00)	8,91
7.4.1	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.2	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.5	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.7	Defisit Investasi Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.8	Defisit Penghapusan Tagihan TP/TG	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.9	Defisit Penghapusan Aset Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5.469.441.615,00)	(5.022.075.663,00)	(447.365.952,00)	8,91
8.4.1	POS LUAR BIASA				
	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.469.441.615,00)	(5.022.075.663,00)	(447.365.952,00)	8,91



Kepala Dinas
LA MANDA DE DENT, S.Sos, M.A.P
 NIP. 19670630 198702 2 001

LAPORAN OPERASIONAL

Halaman 2 dari 2



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Tenaga Kerja		
Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	3.265.455.282,00	3.688.416.309,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.469.441.615,00)	(5.022.075.663,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Aset Tanah	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Aset Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Barang Ekstrakompatabel	0,00	0,00
Koreksi Nilai Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Aset Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Kas BLUD	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Utang Beban	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Hutang Beban Barang dan Jasa	0,00	0,00
Koreksi Beban Pajak Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Hutang Beban Pegawai	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara Dana BOS	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peratalatan dan mesin	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Beban Penyusuan Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	5.989.818.052,00	4.599.114.636,00
EKUITAS AKHIR	3.785.831.719,00	3.265.455.282,00



ATTEN: HANI S.Sos, M.A.P
NIP. 19670630 198702 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2024

Urusan Pemerintahan : 2 Bidang Pemerintahan : 2.01 Unit Organisasi : 2.01.01 Sub Unit Organisasi : 2.01.01.01							
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBIT	KREDIT
1	02-Jan-2024	01/PENYESUAIAN/NA KERTRANS/2024	2.01.01.01.00.00.8.1.2.02.01 2.01.01.01.00.00.1.1.11.02.01	Beban Jasa Kantor Beban Pajak Dibayar Di Muka <i>(Jurnal Balik atas Beban Pajak Dibayar Dimuka Tahun Anggaran 2023)</i>	✓ ✓	3.001.524,00	3.001.524,00
2	03-Jan-2024	02/PENYESUAIAN/NA KERTRANS/2024	2.01.01.01.00.00.2.1.6.01.02 2.01.01.01.00.00.8.1.1.02.01	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN <i>(Jurnal Balik atas Utang Beban Pegawai untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ub Desember 2023)</i>	✓ ✓	91.392.069,00	91.392.069,00
3	31-Dec-2024	03/PENYESUAIAN/NA KERTRANS/2024	2.01.01.01.00.00.1.3.2.05.02 2.01.01.01.00.00.8.1.2.01.01	Alat Rumah Tangga Beban Barang Pakai Habis <i>(Jurnal Penyesuaian atas Reklas dari Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap KIB B)</i>	✓ ✓	3.380.000,00	3.380.000,00
4		04/PENYESUAIAN/NA KERTRANS/2024	2.01.01.01.00.00.1.1.11.02.01 2.01.01.01.00.00.8.1.2.02.01	Beban Pajak Dibayar Di Muka Beban Jasa Kantor <i>(Jurnal Penyesuaian atas Beban Pajak Dibayar Dimuka Tahun Anggaran 2024)</i>	✓ ✓	2.675.599,00	2.675.599,00
5		05/PENYESUAIAN/NA KERTRANS/2024	2.01.01.01.00.00.8.1.1.02.01 2.01.01.01.00.00.2.1.6.01.02	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN <i>(Jurnal atas Pembayaran Utang Beban Pegawai untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ub Desember 2024)</i>	✓ ✓	92.240.316,00	92.240.316,00
6		06/PENYESUAIAN/NA KERTRANS/2024	2.01.01.01.00.00.8.2.1.05.01 2.01.01.01.00.00.1.3.7.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Penyesuaian atas Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KIB B) s.d 31 Desember 2024)</i>	✓ ✓	261.445.129,00	261.445.129,00
7		07/PENYESUAIAN/NA KERTRANS/2024	2.01.01.01.00.00.8.2.2.01.01 2.01.01.01.00.00.1.3.7.02.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung <i>(Jurnal Penyesuaian atas Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C) s.d 31 Desember 2024)</i>	✓ ✓	162.040.287,00	162.040.287,00

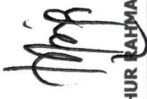


PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2024

Urusan Pemerintahan : 2 Bidang Pemerintahan : 2.01 Unit Organisasi : 2.01.01 Sub Unit Organisasi : 2.01.01.01				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBIT	KREDIT
8		08/PENYESUAIAN/NA KERTRANS/2024	2.01.01.01.00.00.8.2.3.04.01 2.01.01.01.00.00.1.3.7.03.04	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum Akumulasi Penyusutan Jaringan (Jurnal Penyesuaian atas Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) s.d 31 Desember 2024)	√ √	46.793.975,00	46.793.975,00
JUMLAH						662.968.899,00	662.968.899,00

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN


MIFTAHUR RAHMAH, S.Hut

NIP. 19810613 200502 2 005

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan dibuat untuk menyediakan data informasi yang relevan mengenai posisi keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, Laporan Keuangan SOPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan SOPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 295 Ayat 3.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Untuk menyampaikan data informasi secara terbuka dan jujur mengenai kinerja keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau selama satu tahun pada Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 216, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 263);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 223, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 270);
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024.



8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan pada Anggaran Tahun 2024 menggunakan sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Sistematika Penulisan

B. BAB II INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

C. BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

D. BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

E. BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

F. BAB VI PENUTUP

BAB II

INDIKATOR PENCAPAIAN

TARGET KINERJA APBD



BAB II

INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dari program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 ini dilihat dari capaian masing-masing indikator pada masing-masing kegiatan terlihat trend yang cukup baik.

Hal ini menggambarkan terjadinya tingkat aksesibilitas yang tinggi pada masing-masing kegiatan, juga dapat digambarkan bahwa yang dicapai cukup berhasil dalam pelaksanaannya. Ini artinya pelaksanaan program dan kegiatan mampu dilaksanakan sesuai yang direncanakan yaitu tepat sasaran.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN

KINERJA KEUANGAN



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil analisa pengukuran kinerja pada kegiatan menunjukkan bahwa skala pengukuran kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau pada Tahun Anggaran 2024 dinyatakan berhasil. Sedangkan nilai pencapaian sasaran juga dalam klasifikasi sangat baik dan sangat berhasil. Meskipun pengukuran kinerja maupun pencapaian sasaran dalam klasifikasi sangat baik dan sangat berhasil, namun dalam pelaksanaan operasionalnya masih ditemui beberapa masalah, akan tetapi masalah yang dihadapi tidak sampai mengganggu dan menghambat pelaksanaan operasional kegiatan.

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

- a. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Tahun 2024 dapat direalisasikan setelah adanya Perda Nomor 01 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah namun tidak dapat memenuhi target dikarenakan retribusi baru bisa direalisasikan di bulan Juli 2024 sehingga Ijin Tinggal sementara (ITAS) tenaga kerja asing (TKA) masih dalam proses perpanjangan dan Ijin Tinggal Sementara (ITAS) Tenaga Kerja Asing (TKA) yang sudah habis masa kontraknya tidak diperpanjang serta adanya pemutusan kerja pada perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA);
- b. Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja tidak dapat tercapai karena Peraturan Bupati Baru keluar di bulan Juli sehingga kegiatan dapat dilaksanakan di bulan Agustus sampai dengan Desember 2024;
- c. Terbatasnya anggaran, kualitas sumber daya manusia serta teknologi yang masih rendah. Permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan diantaranya kekurangan pegawai pelaksana dan masih terbatasnya pejabat yang menanganinya;
- d. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Kurangnya Bimbingan dan Pelatihan bagi pegawai yang mengakibatkan terkendalanya dalam proses penyelesaian pekerjaan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan entitas akuntansi adalah setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut laporan keuangan pemerintahan yang disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelapor. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau berperan sebagai entitas akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lamandau adalah basis akrual, untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO, beban dalam dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

a. Definisi

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Lamandau, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Lamandau yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali

b. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

Pemerintah Kabupaten Lamandau memiliki hak atas pendapatan;

- Pemerintah Kabupaten Lamandau menerima kas yang berasal dari pendapatan;
- Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.

c. Pengukuran

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

a. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

b. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD, dan khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU/SP2D Nihil.



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Beban diakui pada saat :

- Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
- Terjadinya Konsumsi Aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi, yaitu saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi

c. Pengukuran

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Definisi

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Lamandau, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Lamandau terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran

b. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan pada Rekening Kas Umum Daerah.

c. Pengukuran

- Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.
- Akuntansi pembiayaan neto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.



4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

a. Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b. Pengakuan

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.

c. Pengukuran

Nilai Aset diukur sebesar harga perolehannya.

- **Aset Lancar**

- **Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

- **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Lamandau, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- **Aset tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

- **Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

b. Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

c. Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

a. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

b. Pengakuan

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

c. Pengukuran

Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal

BAB V

PENJELASAN POS-POS

LAPORAN KEUANGAN



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

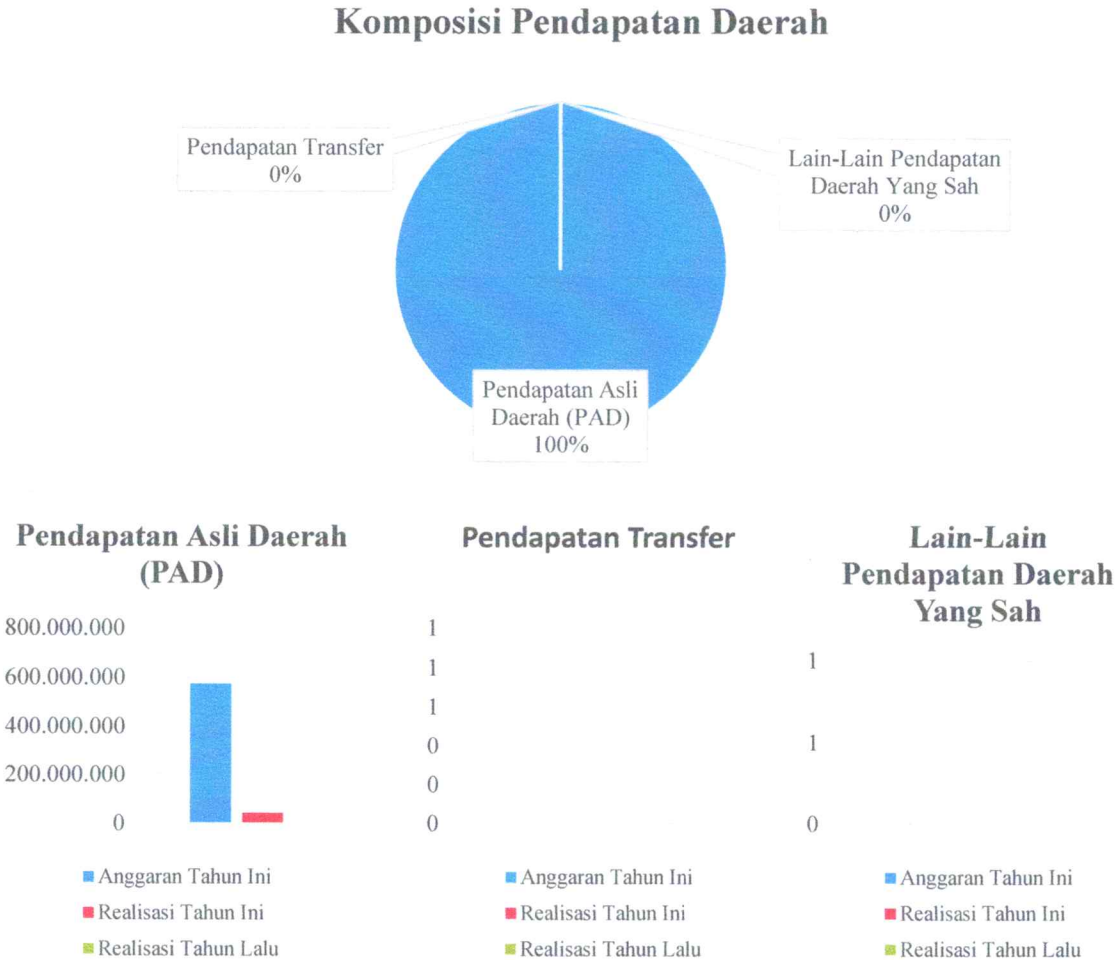
	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Pendapatan	574.171.500,00	43.058.820,00	2.625.000,00

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 43.058.820,00 dan Rp 2.625.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023.

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	574.171.500,00	43.058.820,00	7,50	2.625.000,00
Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	574.171.500,00	43.058.820,00	7,50	2.625.000,00

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.





5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	574.171.500,00	43.058.820,00	2.625.000,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp43.058.820,00 dan Rp2.625.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023.

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Daerah	574.167.000,00	43.045.320,00	7,50	2.625.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	4.500,00	13.500,00	300,00	0,00
Jumlah	574.171.500,00	43.058.820,00	7,50	2.625.000,00

5.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	574.167.000,00	43.045.320,00	2.625.000,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 43.045.320,00 dan Rp 2.625.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.775.000,00	5.025.000,00	181,08	2.625.000,00
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	571.392.000,00	38.020.320,00	6,65	0,00
Jumlah	574.167.000,00	43.045.320,00	7,50	2.625.000,00

Penjelasan :

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
 - Terdapat perda baru (Perda Nomor 01 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) yang berlaku surut dihitung dari bulan Maret 2024 sehingga ada penyesuaian tarif;
 - Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
 - Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Tahun 2024 dapat direalisasikan setelah adanya Perda Nomor 01 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah namun tidak dapat memenuhi target dikarenakan retribusi baru bisa direalisasikan di bulan Juli 2024 sehingga Ijin Tinggal sementara (ITAS) tenaga kerja asing (TKA) masih dalam proses perpanjangan;
 - Ijin Tinggal Sementara (ITAS) Tenaga Kerja Asing (TKA) yang sudah habis masa kontraknya tidak diperpanjang;
 - Adanya pemutusan kerja pada perusahaan yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA);.
- Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut:



- a. Perda Nomor 21 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Perda Nomor 01 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5.1.1.3 Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	4.500,00	13.500,00	0,00

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 13.500,00 dan Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.500,00	13.500,00	300,00	4.500,00
Jumlah	4.500,00	13.500,00	300,00	4.500,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Lain-lain PAD yang sah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Adanya perda baru (Perda Nomor 01 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) yang berlaku surut, mengakibatkan penyewa kurang bayar sehingga harus membayar denda keterlambatan.
- Pemungutan Pendapatan Lain-lain PAD yang sah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut:
 - Perda Nomor 21 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - Perda Nomor 01 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



5.1.2 Belanja

	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Belanja	6.404.482.109,00	6.032.876.872,00	4.601.739.636,00

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 6.032.876.872,00 dan Rp 4.601.739.636,00, dengan rincian sebagai berikut:
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023.

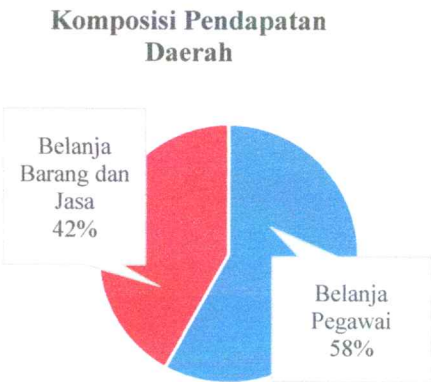
Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BELANJA OPERASI	5.389.196.709,00	5.044.426.872,00	93,60	4.576.989.636,00
BELANJA MODAL	1.015.285.400,00	988.450.000,00	97,36	24.750.000,00
Jumlah	6.404.482.109,00	6.032.876.872,00	94,20	4.601.739.636,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Belanja Operasi	5.389.196.709,00	5.044.426.872,00	4.576.989.636,00

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 5.044.426.872,00 dan Rp 4.576.989.636,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	2.999.411.686,00	2.931.030.594,00	97,72	2.825.608.909,00
Belanja Barang dan Jasa	2.389.785.023,00	2.113.396.278,00	88,43	1.751.380.727,00
Jumlah	5.389.196.709,00	5.044.426.872,00	93,60	4.576.989.636,00





5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Anggaran 2.999.411.686,00	Realisasi 2024 2.931.030.594,00	Realisasi 2023 2.825.608.909,00
-----------------	------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 2.931.030.594,00 dan Rp 2.825.608.909,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok PNS	1.243.732.490,00	1.225.543.600,00	98,54	1.179.033.420,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	32.756.810,00	32.036.000,00	97,80	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	109.012.489,00	107.371.422,00	98,49	98.515.886,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	151.251.375,00	148.890.000,00	98,44	160.270.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.316.250,00	25.900.000,00	98,42	26.040.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.891.625,00	1.850.000,00	97,80	0,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	64.160.499,00	63.114.030,00	98,37	64.960.740,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	740.495,00	724.200,00	97,80	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	88.603.367,00	88.603.367,00	100,00	73.470.869,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.933,00	16.102,00	89,79	16.608,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.921,00	827,00	13,97	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.261.062.432,00	1.228.821.046,00	97,44	1.216.501.386,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	6.800.000,00
Jumlah	2.999.411.686,00	2.931.030.594,00	97,72	2.825.608.909,00

- Penjelasan:
- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Terdapat pegawai baru yaitu pegawai PPPK yang menyebabkan realisasi TA 2024 lebih tinggi;

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2.389.785.023,00	Realisasi 2024 2.113.396.278,00	Realisasi 2023 1.751.380.727,00
-------------------------	------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 2.113.396.278,00, dan Rp 1.751.380.727,00, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023 Per Akun



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.925.000,00	2.925.000,00	100,00	1.950.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.000.000,00	13.758.800,00	98,28	11.465.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	37.859.624,00	37.856.127,00	99,99	20.630.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	94.309.041,00	90.633.160,00	96,10	61.918.150,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	68.113.468,00	54.944.550,00	80,67	47.901.300,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.180.000,00	6.150.000,00	99,51	6.810.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	10.178.580,00	10.170.000,00	99,92	10.350.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.309.250,00	3.380.000,00	40,68	1.880.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	96.710.000,00	92.190.000,00	95,33	35.132.800,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.726.000,00	3.539.000,00	74,88	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	21.855.000,00	18.000.000,00	82,36	0,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	48.100.000,00	46.800.000,00	97,30	0,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	825.000,00	825.000,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	725.000,00	725.000,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Olahraga	10.050.000,00	8.584.000,00	85,41	0,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	35.200.000,00	31.500.000,00	89,49	5.400.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	8.900.000,00	98,89	1.450.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	171.912.000,00	157.604.404,00	91,68	149.095.834,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	62.172.000,00	62.172.000,00	100,00	62.089.795,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22.956.000,00	22.956.000,00	100,00	22.956.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	20.724.000,00	20.724.000,00	100,00	20.724.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tagihan Listrik	42.500.000,00	40.891.350,00	96,21	36.447.227,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.319.148,00	8.319.148,00	100,00	24.113.592,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.700.000,00	4.863.100,00	63,16	5.901.800,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	19.725.108,00	19.725.108,00	100,00	21.484.944,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	104.140.504,00	95.709.952,00	91,90	1.499.952,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	150.800.000,00	64.062.800,00	42,48	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.200.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.000.000,00	1.520.000,00	76,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Taman	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
Belanja Sewa Hotel	4.000.000,00	2.550.000,00	63,75	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	24.000.000,00	23.996.010,00	99,98	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	52.320.000,00	52.039.575,00	99,46	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	50.000.000,00	48.923.250,00	97,85	416.629.398,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	18.000.000,00	17.654.550,00	98,08	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	80.800.300,00	80.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Sosialisasi	23.545.000,00	19.500.000,00	82,82	4.500.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	25.000.000,00	23.560.000,00	94,24	8.400.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	35.710.000,00	35.710.000,00	100,00	71.377.900,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	21.390.000,00	21.390.000,00	100,00	21.411.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00	5.980.000,00	98,03	6.050.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	163.525.000,00	157.103.710,00	96,07	50.834.500,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	525.724.000,00	477.519.434,00	90,83	467.397.451,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	219.206.000,00	173.702.550,00	79,24	133.045.500,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.000.000,00	10.788.700,00	71,92	7.433.584,00
Jumlah	2.389.785.023,00	2.113.396.278,00	88,43	1.751.380.727,00

- Penjelasan:
- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Karena keterbatasan anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga realisasi belanja disesuaikan dengan prioritas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan;



- b. Terdapat pengadaan pakaian dinas (PSL, PSR,PDH, Batik Tradisional dan Pakaian Olahraga) di tahun anggaran 2024;
- c. Kondisi bangunan Gedung kantor sudah banyak kerusakan dan perlu dilakukan rehab gedung yang dilakukan secara bertahap;
- d. Adanya Peraturan Bupati Baru (Perbup Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan) sehingga tedapat kenaikan pada Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN di tahun 2024.
- e. Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja tidak dapat tercapai karena Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan keluar di bulan Juli sehingga kegiatan dapat dilaksanakan di bulan Agustus sampai dengan Desember 2024.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	1.015.285.400,00	988.450.000,00	24.750.000,00

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi pengadaan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam tahun 2024 dan tahun 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.015.285.400,00	988.450.000,00	97,36	24.750.000,00
Jumlah	1.015.285.400,00	988.450.000,00	97,36	24.750.000,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	1.015.285.400,00	988.450.000,00	24.750.000,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 988.450.000,00 dan Rp 24.750.000,00.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	890.440.000,00	872.700.000,00	98,01	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	24.000.000,00	17.250.000,00	71,88	6.450.000,00
Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Personal Computer	100.845.400,00	98.500.000,00	97,67	13.000.000,00
Jumlah	1.015.285.400,00	988.450.000,00	97,36	24.750.000,00



Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Peralatan dan Mesin di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
- a. Realisasi belanja modal di Tahun 2024 meningkat dikarenakan beberapa alat dan mesin di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah usang dan mengalami kerusakan sehingga diperlukan pengadaan baru diantaranya :
- 1. Mobil Operasional Dinas
 - 2. Mobil Jabatan Kepala Dinas
 - 3. Alat Pendingin Ruangan
 - 4. Personal Komputer

5.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Anggaran (5.830.310.609,00)	Realisasi 2024 (5.989.818.052,00)	Realisasi 2023 (4.599.114.636,00)
---	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA TA 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
➤Pendapatan Daerah				
✓Pendapatan Asli Daerah	574.171.500,00	43.058.820,00	7,50	2.625.000,00
✓Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
✓Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
➤Belanja Daerah				
✓Belanja Operasi	5.389.196.709,00	5.044.426.872,00	93,60	4.576.989.636,00
✓Belanja Modal	1.015.285.400,00	988.450.000,00	97,36	24.750.000,00
Jumlah	(5.830.310.609,00)	(5.989.818.052,00)	102,74	(4.599.114.636,00)

5.1.3.1 Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024

Saldo Anggran Lebih Tahun 2024 sebesar (Rp 5.989.818.052,00)



5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi harta atau Aset sebesar Rp 3.878.072.035,00, Kewajiban sebesar Rp 92.240.316,00, dan Ekuitas sebesar Rp 3.785.831.719,00

5.2.1 Aset

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset	3.878.072.035,00	3.356.847.351,00

Total saldo Aset Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 3.878.072.035,00 atau naik sebesar Rp 521.224.684,00 dari tahun 2023 dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lancar	2.675.599,00	3.001.524,00	(10,86)	(325.925,00)
Aset Tetap	3.875.396.436,00	3.353.845.827,00	15,55	521.550.609,00
Aset Lainnya	0	0	0,00	0,00
Jumlah	3.878.072.035,00	3.356.847.351,00	15,53	521.224.684,00

5.2.1.1 Aset Lancar

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Lancar	2.675.599,00	3.001.524,00

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.675.599,00 atau turun sebesar Rp 325.925,00 dari dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 3.001.524,00 disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Beban dibayar dimuka	2.675.599,00	3.001.524,00	(10,86)	(325.925,00)
Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.675.599,00	3.001.524,00	(10,86)	(325.925,00)

5.2.1.1.1 Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Dibayar Dimuka	2.675.599,00	3.001.524,00

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.675.599,00, dan saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.001.524,00,

Adapun Rincian Beban Dibayar Dimuka, sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31 Des 2024	saldo 31 Des 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Beban Pajak Dibayar Di Muka	2.675.599,00	3.001.524,00	(10,86)	(325.925,00)
Jumlah	2.675.599,00	3.001.524,00	(10,86)	(325.925,00)



5.2.1.1.2 Persediaan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Persediaan	0,00	0,00

Saldo persediaan sebesar Rp 0,00 merupakan saldo persediaan 31 Desember 2024 dan saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Persediaan Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2023		0,00
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		0,00
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		0,00
4	Ditambah:		
5	Belanja persediaan LRA 2024	411.280.637,00	
6	Belanja persediaan belum dibayar (utang belanja)	0,00	
7	Belanja persediaan BOS/BLUD	0,00	
8	Penerimaan hibah persediaan	0,00	
9	Reklas dari peralatan dan mesin	0,00	
10	Beban ekstrakompentable	0,00	
11	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8+9+10)		411.280.637,00
12	Dikurangi:		
13	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2023	(0,00)	
14	Reklas ke peralatan dan mesin	(3.380.000,00)	
15	Jumlah tambahan persediaan bersih (13+14)	(3.380.000,00)	
16	Jumlah persediaan yang siap digunakan (3+11+15)		407.900.637,00
17	Beban persediaan (lihat laporan Operasional)		(407.900.637,00)
18	Persediaan tahun 2023 (16+17)		0,00

5.2.1.2 Aset Tetap

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Tetap	3.875.396.436,00	3.353.845.827,00

Saldo Aset Tetap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp 3.875.396.436,00**, mengalami kenaikan sebesar Rp 521.550.609,00 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Tanah	1.402.269.000,00	1.402.269.000,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	4.560.873.334,90	3.569.043.334,90	27,79	991.830.000,00
Gedung dan Bangunan	3.853.715.136,00	3.853.715.136,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	906.890.364,00	906.890.364,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(6.848.351.398,90)	(6.378.072.007,90)	7,37	(470.279.391,00)
Jumlah	3.875.396.436,00	3.353.845.827,00	15,55	521.550.609,00



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Saldo Awal 1 Januari 2024	3.353.845.827,00
Penambahan :	
Belanja Modal 2024	988.450.000,00
Koreksi Pencatatan aset tetap	0,00
Mutasi masuk dari SOPD	0,00
Reklas dari belanja barang dan jasa	3.380.000,00
Pembelian dari Dana BOS/BLUD	0,00
Penambahan bukan pengadaan (Hibah)	0,00
Reklas aset tetap di skpd	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00
Jumlah Penambahan	991.830.000,00
Pengurangan :	
Reklas keluar ke beban Barang dan jasa	0,00
Reklas keluar ke ekstrakom	0,00
Beban penyusutan	470.279.391,00
Mutasi keluar ke SOPD lain	0,00
Reklas aset tetap dan aset lainnya	0,00
Penghapusan Aset Tetap dan Sapi karena terjual/mati	0,00
Reklas keluar ke persediaan (barang yang akan diserahkan ke masyarakat yaitu mobil)	0,00
Jumlah Pengurangan	470.279.391,00
Jumlah (1+2-3)	3.875.396.436,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai aset tetap adalah sebagai berikut:

5.2.1.2.1 Tanah

Tanah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	1.402.269.000,00	1.402.269.000,00

Saldo Aset Tanah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.402.269.000,00 tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2024	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Tanah	1.402.269.000,00	0,00	0,00	1.402.269.000,00	0,00
Jumlah	1.402.269.000,00	0,00	0,00	1.402.269.000,00	0,00



Penambahan sebesar Rp 0,00 dan pengurangan sebesar (Rp 0,00) dengan rincian sebagai berikut :

Tanah	1.402.269.000,00
Penambahan :	
Belanja Modal Tahun 2024 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Tanah Hibah dari Desa Melata (Tanah Pasar)	0,00
Reklas dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00
Mutasi Masuk antar OPD	0,00
Jumlah Penambahan	0,00
Pengurangan :	
Mutasi Keluar antar OPD	
Penghapusan	
Jumlah Pengurangan	(0,00)
Jumlah (1+2-3)	1.402.269.000,00

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Peralatan dan Mesin	4.560.873.334,90	3.569.043.334,90

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 4.560.873.334,90, mengalami kenaikan sebesar Rp 991.830.000,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2024		Saldo per 31/12/2024	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Peralatan dan Mesin	3.569.043.334,90	0,00	991.830.000,00	4.560.873.334,90	991.830.000,00
Jumlah	3.569.043.334,90	0,00	991.830.000,00	4.560.873.334,90	991.830.000,00

Penambahan sebesar Rp 991.830.000,00 dan pengurangan sebesar (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	3.569.043.334,90
Penambahan :	
Belanja Modal Tahun 2024 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin)	988.450.000,00
Belanja modal dari dana bos /blud	0,00
Reklas masuk dari Belanja Barang & Jasa	3.380.000,00
Reklas masuk dari Gedung dan Bangunan	0,00
Reklas masuk dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00
Reklas masuk dari Aset Tetap Lainnya	0,00



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Hibah dari Kementrian	0,00	
Mutasi Masuk dari OPD lain	0,00	
Koreksi pencatatan	0,00	
Jumlah Penambahan		991.830.000,00
Pengurangan :		
Mutasi keluar ke SOPD lain	(0,00)	
Reklas ke Barang Jasa	(0,00)	
Reklas ke Gedung dan Bangunan	(0,00)	
Reklas ke Aset lainnya (rusak berat)	(0,00)	
Reklas keluar ke ekstrakompentable	(0,00)	
Reklas keluar ke persediaan (barang yang akan diserahkan ke masyarakat)	(0,00)	
Jumlah Pengurangan		(0,00)
Jumlah (1+2-3)		4.560.873.334,90

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023			
Gedung dan Bangunan	3.853.715.136,00	3.853.715.136,00			
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 3.853.715.136,00, tidak ada perubahan dengan saldo tahun sebelumnya.					
Uraian	Saldo per 31/12/2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2024		Saldo per 31/12/2024	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Gedung dan Bangunan	3.853.715.136,00	0,00	0,00	3.853.715.136,00	0,00
Jumlah	3.853.715.136,00	0,00	0,00	3.853.715.136,00	0,00

Penambahan sebesar Rp 0,00 dan pengurangan sebesar (Rp 0,00) dengan rincian sebagai berikut :

Gedung dan Bangunan	3.853.715.136,00
Penambahan :	
Belanja Modal Tahun 2023 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Gedung dan Bangunan)	0,00
Reklas dari Belanja Barang Jasa	0,00
Reklas masuk dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00
Reklas masuk dari Peralatan dan Mesin	0,00
Reklas masuk dari KDP	0,00
Hibah dari kementrian	0,00
Koreksi Saldo Awal (atas temuan BPK)	0,00
Jumlah Penambahan	0,00



Pengurangan :		
Reklasifikasi keluar ke Barang Jasa	(0,00)	
Reklas keluar ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	(0,00)	
Reklas keluar ke Peralatan dan Mesin	(0,00)	
Reklas keluar ke KDP	(0,00)	
Reklas keluar ke Aset Tidak Berwujud	(0,00)	
Reklas keluar ke ekstrakompentable	(0,00)	
Mutasi keluar antar SOPD	(0,00)	
Penghapusan	(0,00)	
Jumlah Pengurangan		(0,00)
Jumlah (1+2-3)		3.853.715.136,00

5.2.1.2.4Jalan, Irigasi dan Jaringan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Jalan, Irigasi dan Jaringan	906.890.364,00	906.890.364,00

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 906.890.364,00 tidak ada perubahan dari saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2024		Saldo per 31/12/2024	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan	906.890.364,00	0,00	0,00	906.890.364,00	0,00
Jumlah	906.890.364,00	0,00	0,00	906.890.364,00	0,00

Penambahan sebesar Rp 0,00 dan pengurangan sebesar (Rp 0,00) dengan rincian sebagai berikut :

Jalan, Irigasi dan Jaringan **906.890.364,00**

Penambahan :		
Koreksi pencatatan saldo awal	0,00	
Belanja Modal Tahun 2024 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan)	0,00	
Reklasifikasi Masuk dari Gedung dan Bangunan	0,00	
Reklasifikasi Masuk dari KDP	0,00	
Hibah jaringan listrik dari desa sukamaju dan desa sumber cahaya	0,00	
Mutasi Masuk dari OPD	0,00	
Jumlah Penambahan		0,00
Pengurangan :		
Reklas keluar ke Tanah	(0,00)	
Reklas keluar ke Peralatan dan Mesin	(0,00)	
Reklas keluar ke Gedung dan Bangunan	(0,00)	



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Reklas keluar ke KDP	(0,00)	
Reklas keluar ke barang jasa	(0,00)	
Reklas keluar ke Investasi Permanen	(0,00)	
Mutasi Keluar dari OPD		
Penghapusan	(0,00)	
Jumlah Pengurangan		(0,00)
Jumlah (1+2-3)		906.890.364,00

5.2.1.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Akumulasi Penyusutan	(6.848.351.398,90)	(6.378.072.007,90)

Saldo Aset Akumulasi Penyusutan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp 6.848.351.398,90) mengalami penambahan sebesar (Rp 470.279.391,00), dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2024		Saldo per 31/12/2024	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Akumulasi Penyusutan	6.378.072.007,90	0	470.279.391,00	6.848.351.398,90	470.279.391,00
Jumlah	6.378.072.007,90	0	470.279.391,00	6.848.351.398,90	470.279.391,00

Penambahan sebesar (470.279.391,00) dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan	(6.378.072.007,90)
Penambahan :	
• Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(261.445.129,00)
• Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	(162.040.287,00)
• Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(46.793.975,00)
Jumlah Penambahan	(470.279.391,00)
Pengurangan :	
• Penghapusan	0,00
• Koreksi Salah Saji	0,00
Jumlah Pengurangan	0,00
Jumlah (1+2-3)	(6.848.351.398,90)



5.2.1.3 Aset Lainnya

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Lainnya	0,00	0,00

Nilai Saldo Aset Lainnya Rp 0,00, terdiri atas Aset Lain-lain. Dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya sebelum sebesar Rp 0,00 terdapat kenaikan sebesar Rp 0,00 yang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lain-lain	205.500.000,00	205.500.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(205.500.000,00)	(205.500.000,00)	0,00	(0,00)
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.1.3.1 Aset Lain-lain

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Lain-lain	205.500.000,00	205.500.000,00

Akun ini berisi hasil reklasifikasi barang-barang yang sebelumnya masuk ke dalam kelompok aset tetap berdasarkan hasil inventarisasi seperti kondisi barang rusak berat dan obat expired. Saldo per 31 desember 2024 sebesar Rp 205.500.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 0,00

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lain-lain	205.500.000,00	205.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	205.500.000,00	205.500.000,00	0,00	0,00

Berikut Rincian Aset Lain-lain:

Uraian	Saldo per 31/12/2023	Saldo per 31/12/2024
Aset Rusak Berat/Usang	205.500.000,00	205.500.000,00
dll	0,00	0,00
Jumlah	205.500.000,00	205.500.000,00

5.2.1.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(205.500.000,00)	(205.500.000,00)

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 205.500.000,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp 205.500.000,00.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lain-lain	(205.500.000,00)	(205.500.000,00)	0,00	(0,00)
Jumlah	(205.500.000,00)	(205.500.000,00)	0,00	(0,00)



5.2.2 Kewajiban

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kewajiban	92.240.316,00	91.392.069,00

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 desember 2024 sebesar Rp 92.240.316,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 848.247,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	92.240.316,00	91.392.069,00	0,93	848.247,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	92.240.316,00	91.392.069,00	0,93	848.247,00

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kewajiban Jangka Pendek	92.240.316,00	91.392.069,00

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 desember 2024 sebesar Rp 92.240.316,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 848.247,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Utang Beban	92.240.316,00	91.392.069,00	0,93	848.247,00
Jumlah	92.240.316,00	91.392.069,00	0,93	848.247,00

5.2.2.1.1 Utang Beban

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Utang Beban	92.240.316,00	91.392.069,00

Saldo utang beban yang disajikan per 31 desember 2024 sebesar Rp 92.240.316,00 mengalami penurunan sebesar Rp 848.247,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Utang beban	92.240.316,00	91.392.069,00	0,93	848.247,00
Jumlah	92.240.316,00	91.392.069,00	0,93	848.247,00

Rincian Utang Beban Pegawai sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2024	31 Des 2023
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	92.240.316,00	91.392.069,00
Jumlah	92.240.316,00	91.392.069,00



5.2.3 Ekuitas

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas	3.785.831.719,00	3.265.455.282,00

Saldo ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.785.831.719,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 520.376.437,00 dibanding dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Ekuitas	3.785.831.719,00	3.265.455.282,00	15,94	520.376.437,00
Jumlah	3.785.831.719,00	3.265.455.282,00	15,94	520.376.437,00

5.2.4 Kewajiban dan Ekuitas

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kewajiban dan Ekuitas	3.878.072.035,00	3.356.847.351,00

Saldo kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.878.072.035,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 521.224.684,00 dibanding dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Kewajiban dan Ekuitas	3.878.072.035,00	3.356.847.351,00	15,53	521.224.684,00
Jumlah	3.878.072.035,00	3.356.847.351,00	15,53	521.224.684,00



5.3 Kegiatan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan *Surplus/Defisit* operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

LO digunakan dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan Beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
2. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
3. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

LO disusun untuk melengkapi laporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Lamandau dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut.

	2024	2023	Kenaikan /(Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	43.058.820,00	2.625.000,00	40.433.820,00	1.540,34
Pendapatan Retribusi Daerah	43.045.320,00	2.625.000,00	40.420.320,00	1.539,82
Lain-lain PAD Yang Sah	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2024. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 43.058.820,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2024 (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	43.045.320,00
Lain-lain PAD Yang Sah	13.500,00
Jumlah	43.058.820,00

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:



1) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SOPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 43.045.320,00, dan pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 2.625.000,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	2024	2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Retribusi PenyewaanTanah dan Bangunan	5.025.000,00	2.625.000,00	91,43	2.400.000,00
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	38.020.320,00	0,00	100,00	38.020.320,00
Jumlah	43.045.320,00	2.625.000,00	1539,82	40.420.320,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Terdapat perda baru (Perda Nomor 01 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) yang berlaku surut terhitung dari bulan Maret 2024 sehingga ada penyesuaian tarif;
 - Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Tahun 2024 dapat direalisasikan setelah adanya Perda Nomor 01 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah namun tidak dapat memenuhi target dikarenakan retribusi baru bisa direalisasikan di bulan Juli 2024 sehingga Ijin Tinggal sementara (ITAS) tenaga kerja asing (TKA) masih dalam proses perpanjangan dan Ijin Tinggal Sementara (ITAS) Tenaga Kerja Asing (TKA) yang sudah habis masa kontraknya tidak diperpanjang serta adanya pemutusan kerja pada perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 ini *sama* dengan saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp 43.045.320,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓	0,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah untuk periode TA 2024 sebesar Rp 13.500,00 dan untuk periode tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 0,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut :



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Uraian	2024	2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	13.500,00	0,00	100,00	13.500,00
Jumlah	13.500,00	0,00	100.00	13.500,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Adanya perda baru (Perda Nomor 01 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) yang berlaku surut, mengakibatkan penyewa kurang bayar sehingga harus membayar denda keterlambatan.
- Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2024 ini *sama* dengan saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp 13.500,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓	0,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.3.2 Beban-LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan di Daerah Kabupaten Lamandau, dengan realisasi dalam tahun 2024 sebesar Rp 5.512.500.435,00 tahun 2023 sebesar Rp 5.024.700.663,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut.

JENIS BEBAN	2024	2023
Beban Pegawai	2.931.878.841,00	2.817.689.400,00
Beban Persediaan	407.900.637,00	198.037.750,00
Beban Jasa	820.247.172,00	795.681.019,00
Beban Pemeliharaan	220.183.710,00	149.673.900,00
Beban Perjalanan Dinas	662.010.684,00	607.876.535,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	261.445.129,00	222.247.056,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	162.040.287,00	162.040.287,00
Beban Penyusutan Jalan Jaringan Irigasi	46.793.975,00	71.454.716,00
TOTAL	5.512.500.435,00	5.024.700.663,00

5.3.2.1 Beban Operasi

Rekening ini menggambarkan realisasi Beban Operasi pada Laporan Operasional untuk Tahun 2024. Beban Operasi pada tahun 2024 sebesar Rp 5.512.500.435,00 dan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 5.024.700.663,00 dengan rincian sebagai berikut:



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

JENIS BEBAN	2024	2023
Beban Pegawai	2.931.878.841,00	2.817.689.400,00
Beban Persediaan	407.900.637,00	198.037.750,00
Beban Jasa	820.247.172,00	795.681.019,00
Beban Pemeliharaan	220.183.710,00	149.673.900,00
Beban Perjalanan Dinas	662.010.684,00	607.876.535,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	261.445.129,00	222.247.056,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	162.040.287,00	162.040.287,00
Beban Penyusutan Jalan Jaringan Irigasi	46.793.975,00	71.454.716,00
TOTAL	5.512.500.435,00	5.024.700.663,00

Realisasi masing-masing jenis Beban Operasi tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan Beban Pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp 2.931.878.841,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp 114.189.441,00, atau 4,05% bila dibandingkan dengan beban pegawai tahun 2023 sebesar Rp 2.817.689.400,00 Beban pegawai disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2024 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2024.

Rincian Beban Pegawai tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

URAIAN	2024	2023	Kenaikan Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
Beban Gaji Pokok PNS	1.225.543.600,00	1.179.033.420,00	46.510.180,00	3,94
Beban Gaji Pokok PPPK	32.036.000,00	0,00	32.036.000,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	107.371.422,00	98.515.886,00	8.855.536,00	8,99
Beban Tunjangan Jabatan PNS	148.890.000,00	160.270.000,00	(11.380.000,00)	(7,10)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.900.000,00	26.040.000,00	(140.000,00)	(0,54)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	63.114.030,00	64.960.740,00	(1.846.710,00)	(2,84)
Beban Tunjangan Beras PPPK	724.200,00	0,00	724.200,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	88.603.367,00	73.470.869,00	15.132.498,00	20,60
Beban Pembulatan Gaji PNS	16.102,00	16.608,00	(506,00)	(3,05)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	827,00	0,00	827,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.229.669.293,00	1.208.581.877,00	21.087.416,00	1,74



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

URAIAN	2024	2023	Kenaikan Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
Beban Honorarium	8.160.000,00	6.800.000,00	1.360.000,00	20,00
Pengadaan Barang/Jasa				
TOTAL	2.931.878.841,00	2.817.689.400,00	114.189.441,00	4,05

- Penjelasan:
- Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Beban Pegawai tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 114.189.441,00 (4,05%). Kenaikan ini berasal dari adanya penambahan pegawai PPPK.
 - Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp 848.247,00 (Rp 2.931.878.841,00 – Rp 2.931.030.594,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	848.247,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Pembayaran Utang Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2024	92.240.316,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pembayaran Utang Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Desember 2023	91.392.069,00
Jumlah Penjelasan Selisih	848.247,00

5.3.2.1.2Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.110.342.203,00, dan mengalami peningkatan sebesar Rp 359.072.999,00 atau 20,50% bila dibandingkan dengan beban persediaan tahun 2023 sebesar Rp 1.751.269.204,00, dengan rincian sebagai berikut

URAIAN	2024	2023	Kenaikan Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
Beban Persediaan	407.900.637,00	198.037.750,00	209.862.887,00	105,97
Beban Jasa	820.247.172,00	795.681.019,00	24.566.153,00	3,09
Beban Pemeliharaan	220.183.710,00	149.673.900,00	70.509.810,00	47,11
Beban Perjalanan Dinas	662.010.684,00	607.876.535,00	54.134.149,00	8,91
TOTAL	2.110.342.203,00	1.751.269.204,00	359.072.999,00	20,50

- Penjelasan:
- Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Beban Persediaan mengalami peningkatan diantaranya karena adanya pengadaan pakaian dinas (PSL, PSR,PDH, Batik Tradisional dan Pakaian Olahraga) dimana pada tahun anggaran 2023 tidak ada;



- b. Adanya Peraturan Bupati Baru yaitu Perbup Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga mengakibatkan belanja jasa mengalami peningkatan;
 - c. Belanja Pemeliharaan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2024 dilaksanakan pemeliharaan gedung kantor yang sudah mengalami kerusakan di beberapa bagian;
2. Pengakuan Beban Baran dan Jasa dalam LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar (Rp 3.054.075,00) (Rp 2.110.342.203,00 - Rp 2.113.396.278,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(3.054.075,00)
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Beban dibayar dimuka Tahun 2023	3.001.524,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Beban dibayar dimuka Tahun 2024	2.675.599,00
✓ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.380.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(3.054.075,00)

5.3.2.1.2.1 **Beban Persediaan**

Beban Persediaan merupakan Beban Persediaan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 407.900.637,00, dan mengalami peningkatan sebesar Rp 209.862.887,00 atau 105,97% bila dibandingkan dengan beban persediaan tahun 2023 sebesar Rp 198.037.750,00, dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
Beban Bahan-Bahan Kimia	2.925.000,00	1.950.000,00	975.000,00	50,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.758.800,00	11.465.000,00	2.293.800,00	20,01
Beban Bahan-Bahan Lainnya	37.856.127,00	20.630.500,00	17.225.627,00	83,50
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	90.633.160,00	61.918.150,00	28.715.010,00	46,38
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	54.944.550,00	47.901.300,00	7.043.250,00	14,70
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.150.000,00	6.810.000,00	(660.000,00)	(9,69)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.170.000,00	10.350.000,00	(180.000,00)	(1,74)



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	1.880.000,00	(1.880.000,00)	(100,00)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	92.190.000,00	35.132.800,00	57.057.200,00	162,40
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.539.000,00	0,00	3.539.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	46.800.000,00	0,00	46.800.000,00	100,00
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	825.000,00	0,00	825.000,00	100,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	725.000,00	0,00	725.000,00	100,00
Beban Pakaian Olahraga	8.584.000,00	0,00	8.584.000,00	100,00
TOTAL	407.900.637,00	198.037.750,00	209.862.887,00	105,97

5.3.2.1.2.2 **Beban Jasa**

Beban Jasa merupakan Beban Jasa yang meliputi antara lain jasa konsultan, honorarium, listrik dan lainnya, periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp 820.247.172,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 24.566.153,00 atau 3,09% bila dibandingkan dengan beban jasa tahun 2023 sebesar Rp 795.681.019,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.500.000,00	5.400.000,00	26.100.000,00	483,33
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	1.450.000,00	7.450.000,00	513,79
Beban Jasa Tenaga Administrasi	157.604.404,00	149.095.834,00	8.508.570,00	5,71
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	62.172.000,00	62.089.795,00	82.205,00	0,13
Beban Jasa Tenaga Keamanan	22.956.000,00	22.956.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Supir	20.724.000,00	20.724.000,00	0,00	0,00
Beban Tagihan Listrik	40.891.350,00	36.447.227,00	4.444.123,00	12,19
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.319.148,00	24.113.592,00	(15.794.444,00)	(65,50)
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.189.025,00	5.790.277,00	(601.252,00)	(10,38)



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	19.725.108,00	21.484.944,00	(1.759.836,00)	(8,19)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	95.709.952,00	1.499.952,00	94.210.000,00	6.280,87
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	64.062.800,00	0,00	64.062.800,00	100,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	4.900.000,00	(4.900.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	100,00
Beban Sewa Taman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Beban Sewa Hotel	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	23.996.010,00	0,00	23.996.010,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	52.039.575,00	0,00	52.039.575,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	48.923.250,00	416.629.398,00	(367.706.148,00)	(88,26)
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	17.654.550,00	0,00	17.654.550,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	80.800.000,00	0,00	80.800.000,00	100,00
Beban Sosialisasi	19.500.000,00	4.500.000,00	15.000.000,00	333,33
Beban Bimbingan Teknis	23.560.000,00	8.400.000,00	15.160.000,00	180,48
TOTAL	820.247.172,00	795.681.019,00	24.566.153,00	3,09

5.3.2.1.2.3 **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan merupakan Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp 220.183.710,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp 70.509.810,00 atau 47,11% bila dibandingkan dengan beban pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp 149.673.900,00.

Rincian Beban Pemeliharaan tahun 2024 dan tahun 2023 sebagai berikut:

URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	35.710.000,00	71.377.900,00	(35.667.900,00)	(49,97)



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	21.390.000,00	21.411.500,00	(21.500,00)	(0,10)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.980.000,00	6.050.000,00	(70.000,00)	(1,16)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	157.103.710,00	50.834.500,00	106.269.210,00	209,05
TOTAL	220.183.710,00	149.673.900,00	70.509.810,00	47,11

5.3.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan realisasi sebesar Rp 662.010.684,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp 54.134.149,00 atau 8,91% bila dibandingkan dengan beban perjalanan dinas tahun 2023 sebesar Rp 607.876.535,00 Beban Perjalanan meliputi Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
Beban Perjalanan Dinas Biasa	477.519.434,00	467.397.451,00	10.121.983,00	2,17
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	173.702.550,00	133.045.500,00	40.657.050,00	30,56
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.788.700,00	7.433.584,00	3.355.116,00	45,13
TOTAL	662.010.684,00	607.876.535,00	54.134.149,00	8,91

5.3.2.1.3Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah beban yang berasal dari aset tetap berdasarkan masa manfaat, asset tetap tahun 2024 sudah dilakukan penyusutan sampai dengan posisi per 31 Desember 2024 sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamandau. Total Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp 470.279.391,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp 14.537.332,00 atau 3,19% bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp 455.742.059,00. Rincian Beban Penyusutan per SOPD tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Beban Penyusutan sebagai berikut:

JENIS BEBAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	261.445.129,00	222.247.056,00	39.198.073,00	17,64
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	162.040.287,00	162.040.287,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan Jaringan Irigasi	46.793.975,00	71.454.716,00	(24.660.741,00)	(34,51)
TOTAL	470.279.391,00	455.742.059,00	14.537.332,00	3,19



Penjelasan:

- 1. Perubahan nilai Beban Penyusutan Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Peningkatan nilai Beban Penyusutan Peralatan dan Mesindikarenakan adanya penambahan nilai aset dari hasil belanja modal tahun 2024;
 - b. Adanya penurunan nilai buku sehingga menyebabkan Beban Penyusutan Jalan Jaringan Irigasi mengalami penurunan.

5.3.2.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/ Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Surplus/Defisit LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan	43.058.820,00	2.625.000,00	40.433.820,00	1.540,34
Beban	(5.512.500.435,00)	(5.024.700.663,00)	487.799.772,00	9,71
Surplus/Defisit LO	(5.469.441.615,00)	(5.022.075.663,00)	447.365.952,00	8,91



5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
EKUITAS AWAL	3.265.455.282,00	3.688.416.309,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.469.441.615,00)	(5.022.075.663,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin	0,00	0,00
JUMLAH DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	5.989.818.052,00	4.599.114.636,00
EKUITAS AKHIR	3.785.831.719,00	3.265.455.282,00

Penjelasan :

1. Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024 merupakan Ekuitas Akhir tahun 2023 senilai Rp 3.265.455.282,00;
2. Surplus/Defisit – LO senilai Rp 5.469.441.615,00 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2023;
3. Kewajiban untuk dikonsolidasikan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 5.989.818.052,00 diperoleh dari Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) laporan Realisasi Anggaran (RLA) Tahun Anggran 2024;
4. Saldo Ekuitas Akhir sebesar Rp 3.785.831.719,00 sama dengan ekuitas di Neraca per 31 Desember 2024.

BAB VI

PENUTUP



BAB VI
PENUTUP

Demikian secara singkat uraian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, sesuai dengan Realisasi Anggaran Tahun 2024. Semoga Laporan Keuangan yang disajikan ini dapat digunakan sebagai acuan bahan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun berikutnya.



Pengguna Anggaran,

ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19670630 198702 2 001